

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa perlu untuk selalu memikirkan bagaimana kondisi desanya dimasa yang akan datang, sehingga desa tersebut bertambah maju. Untuk mewujudkan harapan tersebut, berdasarkan sumberdaya yang dimiliki desa, haruslah melihat dari berbagai aspek sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Salah satu sumber daya manusia yang harus kita lihat adalah mereka para penyandang cacat yang kurang diperhatikan oleh pemerintah.

Kecacatan merupakan suatu kondisi dimana adanya kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi seseorang untuk melakukan aktivitas seleyaknya atau aktivitas orang normal biasanya. Maka dapat diambil kesimpulan penyandang cacat adalah seseorang yang mengalami kelainan fisik atau mental untuk melakukan aktivitas seleyaknya.

Menurut UU No. 4 Tahun 1997 pasal 1 ayat 1 tentang penyandang cacat. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya, yang terdiri dari: penyandang cacat fisik, penyandang

cacat mental dan penyandang cacat fisik dan mental. Selain itu menurut UU No.4 Tahun 1997 pasal 6 tentang penyandang cacat ialah setiap penyandang cacat berhak memperoleh: pendidikan pada semua satuan jalur, dan jenjang pendidikan; pekerjaan dan penghimpunan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya; perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya; aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya; rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial dan; hak yang sama untuk menumbuhkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

UU No.4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat sudah berlaku selama 17 tahun di Indonesia, namun belum dapat di Implementasikan dengan baik hingga saat ini. Beberapa tahun terakhir ini, banyak pihak mengupayakan penguatan masyarakat sipil untuk turut aktif dalam pemberdayaan tunagrahita. Hal ini dilakukan mengingat bahwa “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial” berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Adanya keyakinan bahwa masyarakat sipil merupakan satu komponen kekuatan yang dapat melakukan gerakan pembaharuan dalam pemberdayaan penyandang cacat.

Dalam konsep pemberdayaan, menurut Prijono dan Pranarka (1996), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi budaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau pemberdayaan untuk menentukan

pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Sedangkan menurut Sumodinigrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Jadi pemberdayaan adalah serangkaian proses untuk meningkatkan kemampuan personal, perseorangan atau kekuatan politik agar individu- individu, keluarga dan masyarakat dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki keadaan mereka.

Sedangkan Tunagrahita merupakan bagian integral bangsa Indonesia, yang tidak terpisahkan dari anggota masyarakat lainnya. Mereka juga memiliki kebutuhan untuk dicintai dan mencintai, dihargai dan menghargai serta mereka juga mempunyai harga diri seperti masyarakat lainnya. Mereka mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama sebagai Warga Negara Indonesia. Mereka juga memiliki potensi yang dapat dikembangkan sesuai talenta yang dibawa sejak lahir. Permasalahan Tunagrahita merupakan permasalahan sosial, karena merupakan keadaan yang mengarah kepada pelanggaran nilai-nilai, norma, serta mengakibatkan penderita emosional. Bahkan ekonomi dalam masyarakat tunagrahita tidak dapat berjuang secara maksimal untuk membela diri sendiri. Karena mereka memiliki beberapa keterbatasan, utamanya kemampuan intelektual. Didalam kehidupan sehari-hari secara umum mengalami perlakuan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Adanya anggapan dan pandangan negatif dalam masyarakat, akibat keberadaannya hampir terabaikan.

Tunagrahita juga merupakan salah satu masalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang memerlukan penanganan secara melembaga, sistematis, dan berkelanjutan.

Permasalahan yang dihadapi oleh tunagrahita juga merupakan permasalahan bangsa Indonesia. Salah satu permasalahan yang paling mendasar adalah kurangnya pemahaman masyarakat tunagrahita dan rendahnya kepedulian dari berbagai pihak dalam pemberdayaan tunagrahita, kurangnya kepedulian tersebut mengakibatkan perhatian terhadap hak dan kewajiban kita terhadap pemberdayaan tunagrahita sangat kecil. Walaupun ada seperangkat peraturan maupun perundang-undangan untuk pemberdayaan tunagrahita, tanpa adanya kepedulian akan sia-sia.

Kesadaran akan tugas dan tanggung jawab kita terhadap pemberdayaan tunagrahita dapat lebih ditingkatkan. Mereka merupakan asset Negara bidang sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagaimana manusia lainnya. Mereka memiliki potensi yang dapat dikembangkan sesuai dengan talenta yang dibawa sejak lahir. Keberadaan tunagrahita, yang dimana sebagian mereka mengalami hambatan fisik, mental, dan sosial untuk mengembangkan potensi dirinya secara maksimal.

Tapi pada faktanya program kebijakan pemerintah bagi penyandang cacat cenderung berbasis belas kasihan, sehingga kurang memberdayakan penyandang cacat tersebut untuk terlibat dalam masalah. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penyandang cacat menyebabkan perlakuan swadaya pemerintah yang kurang peduli.

Seperti yang kita ketahui upaya memberdayakan penyandang tunagrahita, di Negara kita telah memiliki UU dan kebijakan pemerintah. Seperti pada UU No.4 tahun

1997 tentang penyandang cacat, dan juga rancangan aksi nasional penyandang cacat 2009-2014. Namun didalam pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan baik didalam pengangguran, program, maupun sarana dan prasarana yang tersedia untuk mereka.

Seharusnya semua pihak termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat harus peduli dan secara bersama-sama menangani penyandang tunagrahita agar bisa setara dengan mereka yang tidak tunagrahita (normal), karena selama ini prestasi mereka juga cukup membanggakan di dunia Internasional. Dukungan dari pemerintah dan swasta diharapkan dalam bentuk penganggaran, sarana dan prasarana yang lebih optimal. Sedangkan dari masyarakat adalah bisa menerima keberadaan mereka yang tunagrahita setara dengan kelompok masyarakat lainnya.

Sebagai wujud dari upaya masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat, berbagai kegiatan pemberdayaan yang bersumberdaya masyarakat terhadap penyandang cacat telah dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya diantaranya yaitu kegiatan pemberdayaan tunagrahita di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

Desa Karangpatihan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang cukup jauh dari pusat kota, banyak masyarakat mengetahui desa tersebut adalah desa terpencil yang gersang dimana disana hidup banyak masyarakat yang tinggal dengan ketidak layakan seperti mereka hanya tinggal di gubuk kecil yang dindingnya terbuat dari bambu, dan banyak masyarakat disana yang hidup dibawah kata cukup atau bisa dikatakan miskin. Mereka hanya makan seadanya, jika ada ketela pohon, talas dan lainnya itulah yang mereka makan. Bagi mereka beras merupakan bahan makan

yang mahal dan langka bagi mereka. Sedangkan lauk mereka juga makan seadanya seperti ketela pohon, dan lainnya yang sekiranya bisa mereka makan. Selain itu terdapat banyak warganya yang seharusnya sekolah mereka tak sekolah karena terkendala biaya dan jarak yang cukup jauh, terutama banyak anak kecil yang seharusnya diumur balita mereka di beri gizi yang semestinya, tapi faktanya mereka juga makan seadanya. Para balita itu tidak pernah diperiksa di puskesmas maupun tempat kesehatan lainnya. Karena masalah-masalah diatas banyak dari warga Desa Karangpatihan yang menyidam *down syndrome*, hal mendasar penyebab *down syndrome* (keterbelakangan mental) terjadi karena pemenuhan kebutuhan akan gizi yang tidak cukup, masalah pada kelahiran yang disertai *hypoxia*(kerusakan otak), dan faktor lingkungan seperti yang dijelaskan diatas. Seiring dengan kejadian masyarakat yang terjangkit *down syndrome* di desa tersebut yang semakin meluas mengakibatkan desa tersebut sering disebut “Kampung Idoit”. Bukan hanya masyarakat sekitar kota PONOROGO yang mengetahui keadaan tersebut, bahkan seluruh Indonesia mengetahui keadaan tersebut melalui media-media massa. Selain itu kondisi tersebut diperparah lagi dengan struktur tanahnya tandus karena berada di kawasan pegunungan kapur dan dipengaruhi dengan kurangnya air. Hal tersebut menyebabkan masyarakatnya hidup dalam kondisi yang semakin membuat mereka hidup dalam keprihatinan.

Sedangkan pemerintah pun juga tidak cepat tanggap akan keadaan yang dialami oleh Desa Karangpatihan. Pemerintah pusat seakan menutup mata akan adanya masyarakat yang terjangkit *down syndrome*. Seandainya memang pemerintah pusat sudah turun tangan ke desa tersebut tapi sama sekali belum bisa kita lihat hasil yang nyata akan perubahan bahkan perkembangan akan masyarakat tunagrahita tersebut.

Sebelumnya para penyandang tunagrahita di desa tersebut seperti kaum yang terpinggirkan. Mereka yang selama ini hanya dipandang sebelah mata karena kondisinya serta ketidak produktifannya seakan menjadi beban yang memperberat kemiskinan yang melanda Desa Karangpatihan. Data yang dihimpun di Desa Karangpatihan terdapat 290 kepala keluarga (KK) yg hidup dibawah garis kemiskinan, 561 kepala keluarga (KK) yang hampir miskin serta 48 kepala keluarga (KK) yang mempunyai anggota keluarga penyandang tunagrahita. Jumlah penyandang tunagrahita mencapai 98 jiwa dan mayoritas warga berkebutuhan khusus ini masih berusia produktif pada kisaran usia 40 tahun, hanya beberapa diantaranya berusia anak-anak.

Walaupun peran pemerintah belum maksimal dalam pemberdayaan masyarakat tunagrahita, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangpatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat tunagrahita diatas, telah dilakukan dalam berbagai model pemberdayaan salah satunya pembuatan BLK (Balai Latihan Kerja) yang dimana mayoritas yang di BLK merupakan para tunagrahita dan di desa tersebut masyarakat tunagrahita sudah mengalami perkembangan yang cukup baik, selain itu mereka yang dulunya sering dianggap menyusahkan warga lainnya sekarang sudah berdaya mengembangkan diri melalui program-program yang dibuat di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan latar belakang dari pemikiran tersebut, penelitian ini bermaksud mengambil suatu dimensi yang lebih khusus yaitu menganalisa tentang **Upaya Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita Untuk Mengentaskan Kemiskinan Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.**

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa Saja Upaya Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita Untuk Mengentaskan Kemiskinan Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana Hasil Dari Upaya Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita Untuk Mengentaskan Kemiskinan Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari penelitian ini dapat penulis kemukakan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita Untuk Mengentaskan Kemiskinan Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hasil dari Upaya Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita Untuk Mengentaskan Kemiskinan Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan tentang Upaya Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita Untuk Mengentaskan Kemiskinan Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sehingga dapat memajukan proses dan

peningkatan pemberdayaan masyarakat tunagrahita, secara khusus adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita Untuk Mengentaskan Kemiskinan Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
2. Hasil Penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan guna pemberdayaan masyarakat tunagrahita.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau pedoman untuk penelitian selanjutnya.
4. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membawa masyarakat lebih berperan aktif dalam pelaksanaan pemberdayaan tunagrahita guna untuk mengentaskan kemiskinan.

1.5 Penegasan Istilah

Sesuai dengan judul penelitian Upaya Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita Untuk Mengentaskan Kemiskinan Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, maka disampaikan penegasan istilah dari judul dalam penelitian.

1. Upaya

“Usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar)”. (KBBI).

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, *et.al.*, 1994).

3. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara berkelanjutan, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi. (Soetomo 2011; 25).

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunannya. Kewenangan tersebut meliputi keseluruhan proses pembangunan sejak identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan menarik manfaat hasil pembangunan. Di samping akses dan kontrol terhadap pengambilan keputusan tersebut, masyarakat lokal juga lebih memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya.

5. Tunagrahita

Tunagrahita ialah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata (Somantri, 2006:103).

6. Desa

“ Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

1.6 Landasan Teori

Teori sangat diperlukan untuk memberikan gambaran dan penjelasan secara teoritis terhadap judul penelitian yang dilakukan. Penelitian perlu didukung oleh bukti-bukti teoritis berdasarkan pendapat beberapa ilmuwan atau pakar terhadap variable-variable yang diteliti.

Teori menurut Guentin Gibson adalah seperangkat atau sistem-sistem pertanyaan yang saling kompleks. Definisi teori yang serupa pendapat tersebut adalah seperti yang dikemukakan oleh Nelson Polsby, dimana menurutnya sebuah teori ilmiah merupakan kerangka kerja generalisasi-generalisasi secara deduktif yang berasal dari penjelasan-penjelasan atau prediksi terhadap tipe-tipe dari peristiwa-peristiwa yang diketahui. (Guetino Gibson, 1988 : 5).

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, *et.al.*,1994).

Sedangkan menurut Sumodinigrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa

menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Sedangkan menurut beberapa ahli pemberdayaan merupakan suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport,1984).

Menurut Ife (1995:61-64), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas :

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
2. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
3. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
4. Lembaga-lembaga: kemampun menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kemasyarakatan.
5. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal, dan kemasyarakatan.
6. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
7. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal, maupun karena kondisi eksternal. (Edi Suharto, Ph.D. 2014:60).

Menurut Sennet dan Cabb (1972) dan Conway (1979) menyatakan bahwa ketidakberdayaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena politik, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan finansial, ketiadaan pelatihan-pelatihan, dan adanya ketegangan fisik maupun emosional (Suharto,1997).

Para teoritis, seperti Seeman (1985), Seligman (1972), dan Learner (1986) meyakini bahwa ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat merupakan akibat dari proses internalisasi yang dihasilkan dari interaksi mereka dengan masyarakat. Mereka menganggap diri mereka sebagai lemah dan tidak berdaya, karena masyarakat

memang menganggapnya demikian. Seeman menyebutkan keadaan ini dengan istilah 'aliensi'. Sementara Seligman menyebutkan sebagai 'ketidakberdayaan yang dipelajari' (*learned helplessness*), dan Learner menamakannya dengan istilah 'ketidakberdayaan surplus' (*surplus powerlessness*) (Suharto, 1997:212-213).

Adapun kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok ketidakberdayaan meliputi:

1. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja, penyandang cacat, gay, dan lesbian, masyarakat terasing.
3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan/atau keluarga.

Menurut Kieffer (1981), pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif (Suharto, 1997:215). Parsons *et.al.* (1994:106) juga mengemukakan tiga dimensi pemberdayaan yaitu :

1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan. (Parsons *et.al.*, 1994:106).

Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan:

1. Aras Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *strees management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

2. Aras Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

3. Aras Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Didalam pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan tersebut dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan (Suharto, 1997:218-219):

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.
6. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara berkelanjutan, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi. (Soetomo 2011; 25). Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu-sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama. Sedangkan tujuan mempelajari masyarakat adalah agar dapat melakukan asesmen atau penelitian mengenai masyarakat sehingga mampu memahami konteks dimana kegiatan pemberdayaan masyarakat akan dilaksanakan, mengevaluasi sistem pelayanan kemanusiaan yang ada dan mengerti struktur pengambilan keputusan yang ada diwilayah tersebut.
7. Ada beberapa fungsi masyarakat : penyedia dan pendistribusi barang-barang dan jasa, lokasi kegiatan bisnis dan pekerjaan, keamanan publik, sosialisasi, wadah dukungan bersama atau gotong royong, kontrol sosial, organisasi dan partisipasi politik. (Edi Suharto, Ph.D. 2014).

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunannya. Kewenangan tersebut meliputi keseluruhan proses pembangunan sejak identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan menarik manfaat hasil pembangunan. Di

samping akses dan kontrol terhadap pengambilan keputusan tersebut, masyarakat lokal juga lebih memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya.

Dubois dan Miley (1992:211) memberi beberapa cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat:

1. Membangun relasi pertolongan yang: (a) merefleksikan respon empati; (b) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*); (c) menghargai perbedaan dan keunikan individu; (d) menekankan kerjasama klien (*client partnerships*).
2. Membangun komunikasi yang: (a) menghormati martabat dan harga diri klien; (b) mempertimbangkan keragaman individu; (c) berfokus pada klien; (d) menjaga kerahasiaan klien.
3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang: (a) memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah; (b) menghargai hak-hak klien; (c) merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar; (d) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui: (a) ketaatan terhadap kode etik profesi; (b) keterlibatan dalam pengembangan profesional, riset, dan perumusan kebijakan; (c) penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik; (d) penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

Tunagrahita ialah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata (Somantri, 2006:103). Atau tunagrahita dapat diartikan sebagai cacat ganda yaitu kelainan dalam pertumbuhan dan

perkembangan pada mental intelektual (mental retardasi) sejak bayi dalam kandungan atau masa bayi dan anak-anak yang disebabkan oleh faktor organik biologis maupun faktor fungsional, adakalanya disertai dengan cacat fisik dengan cirri-ciri dan klarifikasi sebagai berikut:

1. Kecerdasan sangat terbatas.
2. Ketidakmampuan sosial yaitu tidak mampu mengurus diri sendiri, sehingga selalu memerlukan bantuan orang lain.
3. Keterbatasan minat.
4. Daya ingat lemah.
5. Emosi sangat stabil.
6. Apatis, acuh tak acuh terhadap sekitarnya.
7. Kelainan badan khusus jenis mongoloid badan bungkuk, tampak tidak sehat, muka datar, telinga kecil, badan terlalu kecil, kepala terlalu besar, mulut melongo, mata sipit.

Sedangkan penyandang tunagrahita (cacat ganda) adalah seseorang yang mempunyai kelainan mental, atau tingkah laku akibat kecerdasan yang terganggu, adakalanya cacat mental disertai dengan cacat fisik sehingga disebut cacat ganda. Adapula jenis kecacatan penyandang tunagrahita (cacat ganda) dikelompokkan menjadi:

1. Debil, yaitu retardasi mental ringan. Penyandang cacat yang termasuk dalam kelompok ini dapat dilatih dan di didik.
2. Embisil, yaitu retardasi mental sedang. Penyandang cacat yang termasuk dalam kelompok ini mampu latih.

3. Idiot, yaitu retardasi mental berat. Penyandang cacat yang termasuk dalam kelompok ini tidak dapat dilatih atau di didik secara biasa, karena tingkat kecerdasan (IQ) sangat rendah.

1.7 Definisi Operasional

Definisi operasional ini merupakan uraian singkat namun terperinci terhadap bagaimana variable-variable penelitian akan diukur. Indikator dari Upaya Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita Untuk Mengentaskan Kemiskinan Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo adalah :

1. Upaya Pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu cara yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan para tunagrahita di desa tersebut dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat setelah terjadinya pemberdayaan tunagrahita dalam :
 - a. Peningkatan perekonomian tunagrahita, masyarakat yang dimaksud adalah seluruh masyarakat tunagrahita desa.
 - b. Upaya Pemberdayaan yang di maksud dalam penelitian ini adalah Upaya Pemberdayaan Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
 - c. Hasil dari upaya pemberdayaan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

1.8 Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmiah ini yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang ada menggunakan metodologi penelitian merupakan hal yang sangat penting agar penelitian yang dilakukan dapat memperoleh hasil seperti yang telah direncanakan dengan baik, benar dan sesuai prosedur. Metode yang diambil dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Strauss dan Corbin (1997), yang dimaksud penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau cara-cara lain dari kuantifikasi (V.Wiratna Sujarweni, 2014:19). Sedangkan menurut Creswell (1998), menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Juliansyah, 2013:34).

Adapun alasan-alasan penulis memilih metode deskriptif kualitatif adalah :

1. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif penulis dapat menggambarkan peristiwa maupun kejadian dengan jelas tentang penelitian ini.
2. Karena metode penelitian deskriptif kualitatif tertuju pada pemecahan-pemecahan masalah pada masa sekarang.
3. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian dan variabel yang diteliti bisa tunggal maupun lebih dari satu variabel.

Dengan menggunakan penelitian metode deskriptif kualitatif tidak sekedar mengumpulkan data saja, akan tetapi juga menyusun menyajikan kemudian menganalisa dan menginterpretasikan data tersebut.

Penelitian data kualitatif adalah suatu proses atau kegiatan untuk menjawab berbagai pertanyaan bagaimana dan mengapa (makna atau proses) dalam pertanyaan nyatanya. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk mengkaji atau membuktikan kebenaran suatu teori, tetapi teori yang telah ada dikembangkan lagi dengan menggunakan data yang terkumpul.

1. Metode Penentuan Daerah Penelitian

Dalam penelitian ini sesuai dengan judul penulis memilih obyek penelitian di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dengan pertimbangan :

- a. Bahwa Desa Karangpatihan merupakan desa yang terpencil yang dimana terdapat banyak masyarakatnya yang menderita tunagrahita.
- b. Bahwa sebelum adanya Kepala Desa yang baru masyarakat tunagrahita belum mengalami perubahan yang cukup terkait kondisi mereka yang tidak produktif.
- c. Diharapkan dengan adanya Kepala Desa yang baru ini bisa membuat masyarakat yang dulunya kurang produktif menjadi lebih berdaya.
- d. Dalam hal ini fokus penelitian diarahkan pada model pemberdayaan masyarakat tunagrahita untuk mengentaskan kemiskinan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

2. Metode Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul Model Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita Untuk Mengentaskan Kemiskinan Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Sedangkan lokasi penelitian ini diwilayah Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan cara menetapkan informan yang dianggap tahu atau mempunyai sangkut pautnya dengan masalah secara mendalam tentang persoalan yang ingin diteliti.

Lexi J Maleong mengungkapkan *Purposive Sampling* :

- a. Menyaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber.
- b. Menggali informasi yang akan menjadi dasar teori yang muncul.

Yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa dan masyarakat dengan jumlah sebagai berikut :

Tabel 1

Daftar Jumlah Informan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	PENDIDIKAN	ALAMAT
1.	Eko Mulyadi	L	Kepala Desa	SMKN	Ds. Karangpatihan
2.	Samuji	L	Jogoboyo II	SLTA	Ds. Karangpatihan
3.	Paimin	L	Kebayan V	SLTA	Ds. Karangpatihan
4.	Nyamut Teguh	L	Modin III	SLTA	Ds. Karangpatihan
5.	Daud	L	Wiraswasta	SLTA	Ds. Karangpatihan
6.	Tukimah	P	Tani	SD	Ds. Karangpatihan
7.	Gimun	L	Tani	SMP	Ds. Karangpatihan
8.	Sipon	P	Tani	SD	Ds. Karangpatihan
9.	Sutris	L	Pelajar	SMP	Ds. Karangpatihan

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Menurut V.Wiratna Sutjarweni teknik wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpatatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancara, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (V.Wiratna Sutjarweni, 2014:31).

Secara umum Interview adalah cara untuk mendapatkan data dari gejala-gejala secara langsung melalui wawancara antara peneliti dan informan. Oleh karena itu dalam melakukan interview perlu diciptakan hubungan yang baik antara peneliti dan informan agar diperoleh data atau informasi yang akurat.

Langkah operasional dari metode ini adalah peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk dijawab informan, dengan menemui informan untuk memperoleh jawaban secara langsung dari para informan. Selanjutnya peneliti mencatat hasil jawaban informan untuk dianalisis.

Dalam metode interview ini informan juga terdiri dari :

- a) Pemerintah Desa Karangpatihan bersama staff.
- b) Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong.
- c) Masyarakat Desa Karangpatihan Kecamatan Balong.

Maka dalam teknik interview ini akan membantu peneliti dalam mengumpulkan data dengan melakukan wawancara guna tujuan mendapatkan informasi yang lebih jelas.

b. Dokumentasi.

Dalam mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang sesuai, metode dokumentasi juga digunakan untuk melengkapi data yang telah didapat sebelumnya. Sehingga diharapkan dapat memperoleh kebenaran dan ketelitian yang semaksimal mungkin sesuai apa yang diharapkan.

Metode ini dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada subjek penelitian yang bertujuan untuk melengkapi observasi dan wawancara yang mendalam.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang di ambil dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Creswell (1998) menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. (Juliansyah, 2011:34).

Menurut Muhammad Idrus dalam Miles dan Huberman (1984:1992) menyebutkan tentang model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut saling menjalin pada saat, sebelum, selama dan sesudah pembentukan yang sejajar untuk membangun wawasan umum.

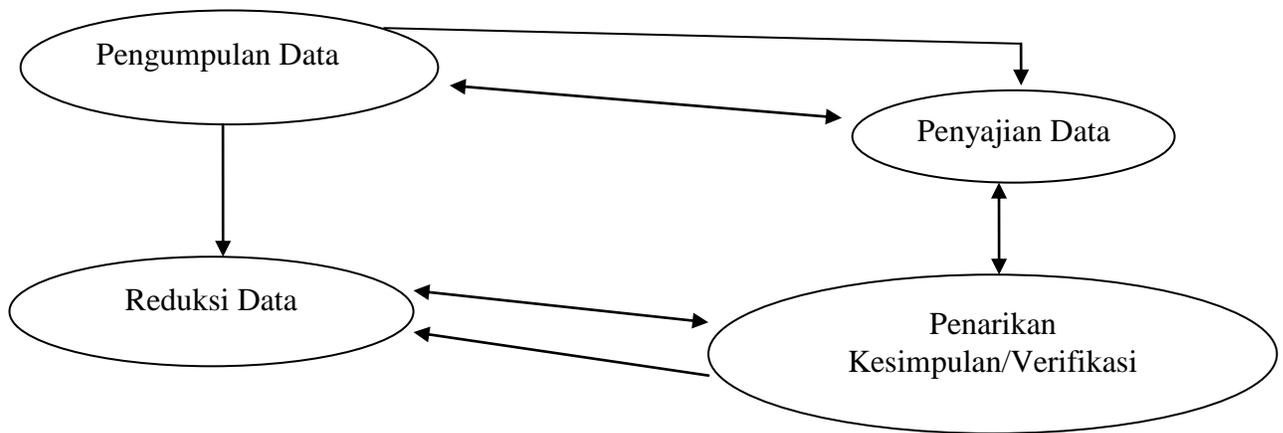
Langkah tersebut tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu untuk mencapai tingkat keakuratan hasil penelitian pada rumusan masalah

yang di angkat dan dirumuskan tentang Model Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita Untuk Mengentaskan Kemiskinan Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Dari beberapa analisis tersebut, maka secara ringkas proses itu dapat digambarkan sebagai berikut (Huberman dan Miles, 1992).

Gambar 1.1

Skema Analisis Data Penelitian



(Huberman dan Miles, 1992)

Dalam model interaktif ini, tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaktif. Dengan sendirinya peneliti harus memiliki kesiapan untuk bergerak aktif di antara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak diantara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama penelitian

Analisis ini merupakan sebuah proses yang berulang dan berkelanjutan secara terus-menerus dan saling menyusul. Kegiatan yang keempatnya berlangsung selama dan setelah proses pengambilan data berlangsung. Kegiatan ini baru berhenti saat penulis akhir penelitian telah siap dikerjakan.

Berikut ini paparan masing-masing proses secara selintas.

1. Tahap pengumpulan data

Pada tahap pengumpulan data peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data sebagaimana telah dibahas sebelumnya yaitu melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

2. Tahap reduksi data

Reduksi data adalah bagian dari kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data yang dibutuhkan, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analisis. Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.

3. Penyajian data

Proses selanjutnya adalah penyajian data sebagaimana yang dimaknai oleh miles dan huberman (1992) sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.

4. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Verifikasi dan penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses pengumpulan data, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus-kasus negatif (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada di masyarakat).